

**STRATEGI BLACK LIVES MATTER GLOBAL NETWORK
FOUNDATION (BLMGNF) DALAM PROSES TRANSNASIONALISASI
GERAKAN BLACK LIVES MATTER**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Studi Ilmu Hubungan Internasional

MUH. NUR ICHSAN TAUHID

4518023020

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**STRATEGI BLACK LIVES MATTER GLOBAL NETWORK
FOUNDATION (BLMGNF) DALAM PROSES TRANSNASIONALISASI
GERAKAN BLACK LIVES MATTER**

MUH. NUR ICHSAN TAUHID

4518023020

Pembimbing I



Zulkhair Burhan, S. IP., M.A.

Pembimbing II



Muh. Asy'ari, S. IP., M.A.

Diketahui Oleh :

Dekan

FISIP Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.IP, M.A.

Ketua Jurusan

Hubungan Internasional


Muh. Asy'ari, S. IP., M.A.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Bulan Juni Tahun 2022 Skripsi dengan Judul
**STRATEGI BLACK LIVES MATTER GLOBAL NETWORK
 FOUNDATION (BLMGNF) DALAM PROSES TRANSNASIONALISASI
 GERAKAN BLACK LIVES MATTER**

Nama : **MUH. NUR ICHSAN TAUHID**

Nomor Stambuk : **4518023020**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
 Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Sosiologi

Pengawas Umum :



Arief Wicaksono, S. IP, M.A.

Panitia Ujian :



Zulkhair Burhan, S. IP., M.A.

Ketua



Muh. Asy'ari, S. IP., M.A.

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S. IP., M.A.


 (.....)

2. Muh. Asy'ari, S. IP., M.A.


 (.....)

3. Arief Wicaksono, S. IP, M.A.


 (.....)

4. Rosnani, S. IP., M.A.


 (.....)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) dalam Proses Transnasionalisasi Gerakan Black Lives Matter. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada beberapa pihak yang sudah memberikan tenaga maupun pikirannya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Kepada;

1. Kedua orang tua, untuk Ibu Ir. Eli Sukaesih, S.E. dan Bapak Drs. Darwan, M.Si. yang selalu memberi support disetiap kegiatan yang peneliti suka dan lakukan selama perkuliahan, dukungan materi maupun dukungan moral. Saya tahu kata Terimakasih Saja tidak akan bisa membalas atas semua yang telah mereka berikan kepada saya. Serta kakak saya Mu'fidatul Nurul Hajjad, S.E., M.M yang juga turut andil dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A. Selaku pembimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala saran, masukan, dan kritikan yang tentu saja punya manfaat besar dalam proses penyelesaian skripsi ini secara baik dan tepat pada waktunya. Dan juga terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi selama proses pengerjaan skripsi ini.

3. Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A atau yang akrab saya panggil Pak Bobby selaku Pembimbing Akademik peneliti yang selalu menjadi tempat meminta saran selama perkuliahan di Prodi HI Unibos. Terima kasih atas semua masukan, kritikan, dan nasehat beliau yang pasti akan memberi manfaat bagi peneliti untuk lebih baik lagi kedepannya.
4. Semua Bapak dan Ibu Dosen, Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A., Ibu Rosnani, S.Ip., M.A., Bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A., Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip., M.A., dan Ibu Becce Bt. Mamma, S .Ip., M.A. Terima kasih telah bersedia untuk membagikan Ilmu dan pengetahuannya yang sangat amat berharga.
5. Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang membantu segala administrasi peneliti.
6. Nikmatul Fardaz, S.Pd., M.Pd., yang selalu mendampingi, membantu, dan memberi motivasi kepada peneliti sehingga proses pengerjaan skripsi ini menjadi lebih ringan, menyenangkan dan penuh cinta.
7. Teman-teman alumni MAN 1 Mamuju khususya Wirajuddin yang juga sudah menjadi teman diskusi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan HI Angkatan 18, khususnya HI B.

ABSTRAK

Rasisme adalah satu dari sekian banyak masalah global dan masih terjadi hingga saat ini. Pada saat ini, rasisme masih menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan diberbagai negara. Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) merupakan lembaga organisasi yang terdepan menyuarakan hak-hak warga kulit hitam di seluruh penjuru dunia melalui gerakan Black Lives Matter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan Black Lives Matter (di Kanada & Australia) dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network's* (TAN's) oleh Keck & Sikkink. Adapun hasil temuan tentang strategi yang digunakan BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan Black Lives Matter adalah : (1) Formal. Formal yang dimaksud peneliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Meliputi *Leverage Politics* dan *Accountability Politics*. (2) Informal yang dimaksud peneliti adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebijakan. Meliputi *Information Politics* dan *Symbolic Politics*.

Kata kunci; Rasisme, BLMGNF, BLM, Transnasional, Kanada-Australia.



ABSTRACT

Racism is one of many global problems and is still happening today. At this time, racism is still an unresolved problem in many countries. The Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) is an organization that is at the forefront of voicing the rights of black people around the world through the Black Lives Matter movement. The purpose of this study was to find out how the strategy used by BLMGNF in the process of transnationalizing the Black Lives Matter movement (in Canada & Australia) using the concept of Transnational Advocacy Network's (TAN's) by Keck & Sikkink. The findings regarding the strategy used by BLMGNF in the transnationalization process of the Black Lives Matter movement are: (1) Formal. Formal is meant by researchers are matters relating to policies issued. Includes Leverage Politics and Accountability Politics. (2) Informal what the researcher means is things that are not related to policy. Includes Information Politics and Symbolic Politics.

Keywords; Racism, BLMGNF, BLM, Transnational, Canada-Australia.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
1. Batasan Masalah	7
2. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
1. Konsep Transnational Advocacy Network (TAN)	8
E. Metode Penelitian	12
1. Tipe Penelitian	12
2. Jenis dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	12
F. Rencana Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Transnational Advocacy Network	15
1. Boomerang Pattern	16
2. Information Politics	18
3. Symbolic Politics	19
4. Leverage Politics	20
5. Accountability Politics	21
BAB III GAMBARAN UMUM	23
A. Rasisme dan Gerakan Anti Rasisme di Amerika Serikat	23
1. Rasisme di Amerika	23
2. Gerakan Anti Rasisme di Amerika.....	26
B. Black Live Matters Global Network Foundation dan Gerakan Anti	
Rasisme Global	34
1. Black Lives Matter Global Network Foundation.....	34
2. Gerakan Anti Rasisme Global	36
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	39
A. BLMGNF dan Transnasionalisasi Isu BLM (2013-2020)	39
B. Transnasionalisasi Gerakan BLM.....	42
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasisme adalah satu dari sekian banyak masalah global dan masih terjadi hingga saat ini. Pada masa sekarang, rasisme tetap menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan di berbagai negara, tidak terkecuali Amerika. Salah satu kasus rasisme yang cukup terkenal pada tahun 2016 adalah insiden Baton Rouge di Louisiana dan insiden Falcon Heights di Minnesota. Awal mula kasus ini adalah saat seorang laki-laki berusia 37 tahun terkena tilang oleh seorang polisi, kemudian laki-laki yang berumur 37 tahun itu lalu membuka laci di *dashboard* dan hendak mengambil berkas atau dokumen yang polisi itu minta, namun polisi itu malah berteriak “dia punya senjata” dan berakhir dengan penembakan yang menewaskan pria 32 tahun itu. (www.dw.com, 2016).

Isu rasisme di Amerika yang tidak menemukan titik terang penyelesaian ini pun melahirkan banyak gerakan sosial global. Dimana gerakan sosial global adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi non formal untuk melawan sistem sosial melalui kampanye isu-isu sosial maupun isu-isu politik. (Juni Rosmanto, 2013). Satu dari sekian banyak gerakan sosial global yang fokus isunya rasisme adalah gerakan *Black Lives Matter* atau BLM. BLM adalah sebuah gerakan sosial politik yang dibuat dengan tujuan untuk memprotes tindak kekejaman polisi maupun semua jenis tindak kekerasan yang motifnya rasis terhadap orang

kulit hitam. Gerakan BLM ini dikordinir dan diatur oleh sebuah organisasi non pemerintah bernama Black Lives Matter Global Network Foundation yang selanjutnya disingkat BLMGNF.

BLMGNF dibentuk oleh 3 orang aktivis wanita kulit hitam pada tahun 2013. Fungsi organisasi ini adalah untuk menjadi wadah (online) bagi para aktivis untuk memberikan prinsip maupun tujuan bersama. Anggota-anggota dari organisasi ini melewati lintas batas negara karena organisasi ini bersifat internasional dan memiliki beberapa cabang di luar Amerika, tetapi terikat dengan visi dan misi yang sama yaitu mengadvokasi pemberantasan rasisme sistematis sekaligus mencegah kekerasan polisi di masa yang akan datang. (blacklivesmatter.com, 2020).

Gerakan BLM ini muncul dimulai ketika salah satu dari pendiri BLMGNF bernama Patrice Cullors mengunggah sebuah tagar yaitu *#BlackLivesMatter* di akun twitternya atas kasus dibebaskannya George Zimmerman yang merupakan penembak seorang remaja kulit hitam berusia 17 tahun bernama Trayvon Martin di tahun 2012. (www.bbc.com, 2013). Dua tahun berikutnya gerakan BLM akhirnya diakui secara nasional dalam melakukan aksi demonstrasi. Kemudian dari tahun 2014 – 2016, BLMGNF melakukan ekspansi dengan membangun cabang lokal yang kurang lebih 30 cabang. Lalu di tahun 2020, gerakan BLM lagi-lagi menjadi berita utama nasional bahkan menarik perhatian masyarakat internasional selama protes global terhadap kasus meninggalnya George Floyd yang dilakukan oleh Derek Chauvin yang merupakan seorang polisi. Sekitar 15 hingga 26 juta

orang yang ikut bergabung dalam gerakan BLM 2020 di Amerika, hal ini menjadikan gerakan BLM sebagai salah satu gerakan paling besar sepanjang sejarah Amerika. (www.nytimes.com, 2020).

Kemudian gerakan BLM juga bergaung di negara lain di luar Amerika seperti Australia. Aksi protes terjadi di seluruh Australia seperti di Sydney, Brisbane, dan di Melbourne, aksi protes ini dihadiri sekitar 40.000 total pengunjung rasa. Selain tuntutan keadilan atas kematian George Floyd, aksi protes gerakan BLM di Australia juga menuntut hal lain yaitu keadilan terhadap kelompok suku Aborigin yang selalu mendapatkan tindakan diskriminasi rasis oleh pemerintah Australia terutama selama masa penahanan oleh kepolisian Australia. (www.theguardian.com, 2020). Selain di Amerika Serikat dan Australia, gerakan #BlackLivesMatter juga terjadi di Brazil, dimana 2 anak berkulit hitam meninggal, Miguel Otávio Santana da Silva yang jatuh dari balkon sebuah gedung dibawah pengawasan bos kulit putih ibunya, dan João Pedro Matos Pinto yang ditembak oleh polisi Rio de Janeiro pada saat penggerebekan, dia dibunuh di minggu yang sama dengan George Floyd. Kematian kedua anak ini memicu protes di kota-kota seluruh negeri. (www.barrons.com, 2020), (www.theguardian.com 2020).

Lalu di Kanada juga terjadi gerakan #BlackLivesMatter, dimana pada tahun 2020 kematian 2 orang, yaitu Regis Korchinski Paquet dan D'Andre Campbell di Kanada memicu protes BLM yang menuntut penghentian layanan polisi disana. (www.cbc.ca, 2020). Kemudian di Denmark juga demikian, setelah pembunuhan George Floyd pada Juni 2020, BLM

Denmark mengadakan demonstrasi di Kopenhagen yang membawa hingga 15.000 peserta. (www.dr.dk, 2020). Lalu di Perancis pun juga demikian, pada Juli 2020, ribuan demonstran berbaris di dekat Paris untuk memperingati 4 tahun sejak kematian Adama Traore, yaitu seorang pria kulit hitam yang di tangkap dan pingsan setelah dijepit ketanah oleh petugas kepolisian pada Juli 2016. (www.dw.com, 2020).

Kemudian di Jerman juga terjadi gerakan #BlackLivesMatter, dimana pada Juli 2020, terdapat lebih dari 15.000 demonstran berpartisipasi dalam pawai anti-rasism di Berlin dengan tuntutan kebrutalan polisi. (www.dw.com, 2020). Di negara Asia seperti Jepang juga terjadi gerakan gerakan #BlackLivesMatter, pada Juni 2020 setelah kematian George Floyd, terjadi beberapa demonstrasi di Jepang, terdapat 1000 orang demonstran di Osaka dan pawai anti-rasisme yang terdiri dari 3.500 orang. (www.japantimes.co.jp 2020). Lalu demikian di Selandia Baru, gerakan #BlackLivesMatter juga terjadi sebagai tanggapan atas kasus pembunuhan George Floyd yang diadakan di beberapa kota di Selandia Baru. (www.nzherald.co.nz, 2020). Dan terakhir gerakan #BlackLivesMatter terjadi di Inggris, pada tahun 2020 protes diadakan untuk mendukung BLM di Amerika Serikat. Menyusul kematian George Floyd, protes terjadi di beberapa tempat antara lain di Trafalgar Square, Hyde Parkm Parliament Square, dan di luar Kedutaan Besar AS. (Frisca Alexandra, Rahmah Daniah, 2020).

Berdasarkan penjelasan terkait kasus yang terjadi di beberapa negara di atas, diketahui bahwa gerakan BLM mengalami proses transnasionalisasi.

Menurut Keohane & Nye mendefinisikan transnasionalisme sebagai “*the movement of tangible or intangible items across state boundaries when at least one actor is not an agent of government or an international organization*”. (sebuah gerakan yang berwujud maupun tidak berwujud yang melintasi batas negara dimana setidaknya terdapat satu aktor non pemerintah atau organisasi internasional) (Keohane & Nye, 1971). Transnasionalisasi adalah sebuah fenomena yang terjadi di lintas batas negara yang dilakukan oleh aktor dimana salah satu aktornya adalah aktor non negara. (www.britannica.com, 2021).

Dari definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa Transnasionalisasi merupakan sebuah interaksi satu sama lain, baik dengan negara maupun dengan organisasi internasional dengan tujuan membentuk jaringan aktivis, yang dibentuk berdasarkan perbedaan ideologi atau nilai-nilai yang berbeda. Dalam hal ini terjadi sebuah proses transnasionalisasi gerakan #BlackLivesMatter yang dilakukan oleh BLMGNF.

Dengan besarnya gerakan BLM di berbagai negara secara kuantitas maupun kualitas, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana proses transnasionalisasi gerakan ini berlangsung. Hal ini inilah kemudian yang menjadi fokus penelitian saya.

Penelitian yang relevan dengan tema besar peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Milzam, Julian E. 2020. Dengan judul “Gerakan

Perlawanan Terhadap Rasisme Bentuk Baru “*Black Lives Matter*” Di Amerika Serikat” dengan hasil penelitian penyebab munculnya gerakan tersebut adalah dikarenakan adanya kondusivitas dan ketegangan yang terstruktur oleh gerakan rasisme bentuk baru, kematian seorang Afrika-Amerika yang dilakukan oleh polisi merupakan salah satu faktor pemercepat, budaya rasisme yang terikat kuat yang telah menjadi kepercayaan umum, mobilisasi para aktivis oleh gerakan *Black Lives Matter*, serta kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. (Milzam, 2020). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alexandra. F & Daniah. R. 2020. Dengan judul penelitian “Resonansi Black Lives Matter di Australia” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi sosial di dalam masyarakat Australia telah menciptakan konflik dominan di Australia, hal inilah yang menyebabkan gerakan *Black Lives Matter* beresonansi di Australia. (Alexandra & Daniah, 2020) Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rino. S Y. 2021. Dengan judul penelitian “Peran *Cyberactivism* Oleh *Anonymous Group* Dalam *Black Lives Matter Movement* Di Amerika Serikat (2014-2020)” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa berdasarkan konsep cyberlibertarianism, *Anonymous Group* memiliki peran sebagai salah satu sumber informan penting pada gerakan *Black Lives Matter* yang melakukan *hacking* dan *sharing* ke publik. (Rino, 2021).

Merujuk pada 3 penelitian yang relevan diatas maka yang menjadi pembeda dengan riset penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian

pertama dan kedua fokus meneliti mengenai muncul dan berkembangnya gerakan BLM, penelitian ketiga meneliti tentang peran *Anonymous Group* dalam menyebarkan gerakan BLM sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) dalam proses transnasionalisasi gerakan *Black Lives Matter*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini mencoba melihat strategi yang digunakan oleh BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan Black Lives Matter pada tahun 2013-2020 yang peneliti batasi pada 2 negara, yaitu Kanada dan Australia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut;

Bagaimana strategi yang digunakan oleh BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan Black Lives Matter?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan BLM.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yang pertama adalah menjadi salah satu syarat peneliti agar dapat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar. Dan yang kedua adalah diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para peneliti yang melakukan penelitian terkait isu rasisme khususnya isu *Black Lives Matter*.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* atau TAN's oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink.

1. Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Margareth Keck dan Kathryn Sikkink mendefinisikan jaringan advokasi transnasional sebagai aktor yang melakukan pemecahan masalah berskala internasional, dimana aktor ini bersatu atas dasar *value* yang sama, komunikasi bersama, serta terjalinnya saling tukar informasi dan bantuan yang bisa diandalkan. (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. 1999). Aktor-aktor ini kemudian diatur untuk bekerjasama dalam mengajukan fenomena ataupun pertanyaan baru.

Keck & Sikkink mengatakan bahwa konsep TAN's ini unik dikarenakan sering melibatkan individu dalam mengadvokasikan sebuah perubahan kebijakan dan konsep TAN's ini diatur untuk

mengiklankan sebuah tujuan, norma, maupun gagasan. (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. 1999).

Aktor pada konsep TAN's tidak pernah mengandalkan kekuatan ekonomi ataupun militer sebagai strategi mereka, mereka lebih mengandalkan jaringan atau *network* aktor advokasi yang memiliki peningkatan pengaruh secara signifikan, sehingga membuat mereka menjadi salah satu aktor yang pantas untuk dipertimbangkan.

Jaringan ataupun *networking* mempunyai cara propaganda mereka sendiri yang menjadikan mereka sebagai aktor yang penting. Selama kampanye, isu yang mereka advokasikan mempunyai latar belakang yang khusus, seperti isu etnis ataupun isu lingkungan. Jika pada proses pembuatan sebuah kebijakan hanya bisa dijangkau oleh negara yang merupakan aktor tradisional, *networking* ini akan membuat sebuah jalan masuk kedalamnya yang kemudian memberikan manfaat terhadap masyarakat yang tidak bisa mengakses hal tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa *networking* ini mengangkat pertanyaan yang asalnya dari masyarakat untuk bisa didengarkan dan diikuti oleh pemerintah. (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. 1999).

Berdasarkan konsep TAN's oleh Keck & Sikkink, ada 9 aktor utama yang bisa berkontribusi, yaitu *Non Governmental Organizations* atau NGO nasional maupun internasional, media, organisasi keagamaan, gerakan sosial lokal, aktor perdangan, peneliti, organisasi

regional maupun intergovernmentar, dan terakhir parlementer pemerintah atau badan eksekutif.

Dibentuk dan dioperasikannya *networking* TAN's ini hanya perlu sejumlah kecil dari aktor-aktor tersebut, misalnya pemerintah, pelaku kegiatan, dan gerakan sosial lokal. Aktor ini mengacu pada *networking* TAN's yang memiliki peran penting. Aktor *networking* TAN's juga tetap kesulitan untuk masuk kedalam politik dalam negeri sebuah negara, karenanya mereka menggunakan *networking* internasional untuk membantu mereka dalam melakukan pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi, dari sinilah terbentuk sebuah pola interaksi yang disebut oleh Keck & Sicking sebagai "*Boomerang Pattern*" atau "Pola Boomerang".

Boomerang Pattern adalah sebuah pola interaksi para aktor didalam *Transnational Advocacy Network* (TAN). *Boomerang Pattern* ini muncul dikarenakan diblokirnya jalur aspirasi dari para aktor dalam negeri suatu negara terhadap pemerintahannya sendiri. Aktor-aktor ini pun melakukan strategi alternatif yaitu dengan membuat jaringan atau hubungan dengan para aktor internasional untuk mendapatkan dukungan terhadap isu yang sedang mereka perjuangkan sekaligus mempengaruhi negara mereka dari luar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Keck dan Sicking mengelompokkan strategi *Transnational Advocacy Network* (TAN) ke

dalam empat macam, yaitu : *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

Information Politics merupakan kemampuan untuk mengembangkan informasi secara cepat dan akurat serta mengarahkan informasi tersebut agar berdampak besar.

Symbolic Politics merupakan kemampuan dalam merepresentasikan simbol, bisa dalam bentuk tindakan atau kisah, kisah diyakini dapat menggambarkan serta mewakili isu-isu yang akan dibawa kepada masyarakat.

Leverage Politics merupakan kemampuan untuk mengumpulkan aktor yang memiliki pengaruh maupun kekuatan untuk memberi pengaruh kepada masyarakat sehingga mereka dapat memperkuat pergerakan jejaring mereka kedepannya.

Yang terakhir yaitu *Accountability Politics*, ini merupakan kemampuan untuk menjaga dan memantau pergerakan pemerintah dalam keadaan seperti itu sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan tujuan mereka.

Keempat strategi politik tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisa proses transnasionalisasi gerakan Black Lives Matter yang dilakukan oleh BLMGNF.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh peneliti ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif, yaitu metode yang penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang sedang diteliti berdasarkan sudut pandang dari peneliti. Hal tersebut berkaitan dengan variable penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari hasil studi pustaka, yang diperoleh dari berbagai dokumen, buku, media massa, situs resmi, dan jurnal dari website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik telaah pustaka, yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai artikel dan literatur seperti buku teks, buku elektronik, jurnal, website resmi, penelitian sebelumnya, dan artikel yang memiliki hubungan dengan variable penelitian ini. .

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh oleh peneliti di analisa menggunakan teknik analisa kualitatif yang dimana cara menganalisa data dilakukan dengan menekankan pada data non-matematis. Dalam menganalisis data, peneliti melakukan beberapa tahapan, diantara (1) Pertama peneliti mengumpulkan data yang diperlukan terkait dengan BLMGNF dan gerakan BLM. (2) Kedua peneliti kemudian mengaplikasikan konsep TAN's untuk menganalisis data-data yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya, dimana terdapat 4 indikator dalam konsep TAN's yaitu *Information Politics*,

Symbolic Politics, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*. Data-data yang telah terkumpul kemudian peneliti kategorisasikan sesuai dengan 4 indikator tersebut. (3) Ketiga setelah proses kategorisasi selesai, peneliti kemudian meninjau kembali data-data tersebut dengan mengacu pada konsep yang peneliti gunakan.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, akan membahas lebih detail mengenai konsep *Transnational Advocacy Networks* oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink.

Bab III : Gambaran Umum

Dalam bab ini akan membahas gambaran umum yang dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, peneliti membahas rasisme dan gerakan anti rasisme di Amerika Serikat. Kedua, peneliti membahas BLMGNF dan gerakan anti rasisme global.

Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini, akan membahas mengenai strategi yang dilakukan Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) dalam proses transnasionalisasi Gerakan Black Lives Matter.

Bab V : Penutup

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari analisa yang dilakukan peneliti dalam bab sebelumnya, dan bab ini juga akan berisi saran-saran yang tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu perkembangan bagi studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya pada isu Rasisme dan Gerakan Sosial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Transnational Advocacy Network

Pada akhir abad ke-20, dunia politik tidak lagi hanya melibatkan negara sebagai aktor utamanya, tetapi juga terdapat aktor-aktor nonnegara yang saling berinteraksi satu sama lain, serta organisasi internasional yang juga ikut melibatkan diri di dalamnya. Dunia politik Internasional saat ini sudah terstruktur ke dalam banyak jaringan, diantaranya pelaku ekonomi, ilmuwan dan pakar (ahli), perusahaan, serta jaringan profesional lain yang mendukung terjadinya interaksi ini. Kemudian terdapat juga aktor nonnegara lain seperti para aktivis yang bersatu dan berpecah dikarenakan adanya gagasan moral, prinsip dan nilai-nilai (*value*) yang di perjuangkan. Jaringan ini kemudian yang disebut sebagai *Transnational Advocacy Networks* (Keck & Sikkink, 1998).

Jaringan advokasi ini bersifat *borderless* atau tanpa batas, baik secara regional, domestik dan internasional, maupun secara transnasional. Jaringan-jaringan ini bersatu diatas kesamaan nilai-nilai (*value*) yang mereka perjuangkan, seperti isu-isu terkait hak asasi manusia, lingkungan, dan kesetaraan gender. Nilai-nilai yang mereka perjuangkan ini menjadikan mereka sebagai penyatu dari norma-norma sosial dan budaya yang bisa mendukung terjadinya proses integrasi baik secara regional maupun internasional. Jaringan advokasi yang sifatnya *borderless* ini

menghilangkan batasan-batasan antara negara dengan warganya sendiri serta membantu mengubah kebijakan nasional (Keck & Sikkink, 2018).

Aktor-aktor utama dalam TAN dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat internasional dan regional, bisa juga berupa organisasi penelitian dan advokasi nonpemerintah, yayasan, gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, gerakan sosial lokal, media, bagian dari organisasi antarpemerintah regional dan internasional, maupun bagian dari eksekutif atau cabang pemerintah parlemen (Keck & Sikkink, 1998). Akan tetapi, tidak semua aktor tersebut muncul di dalam setiap jaringan advokasi.

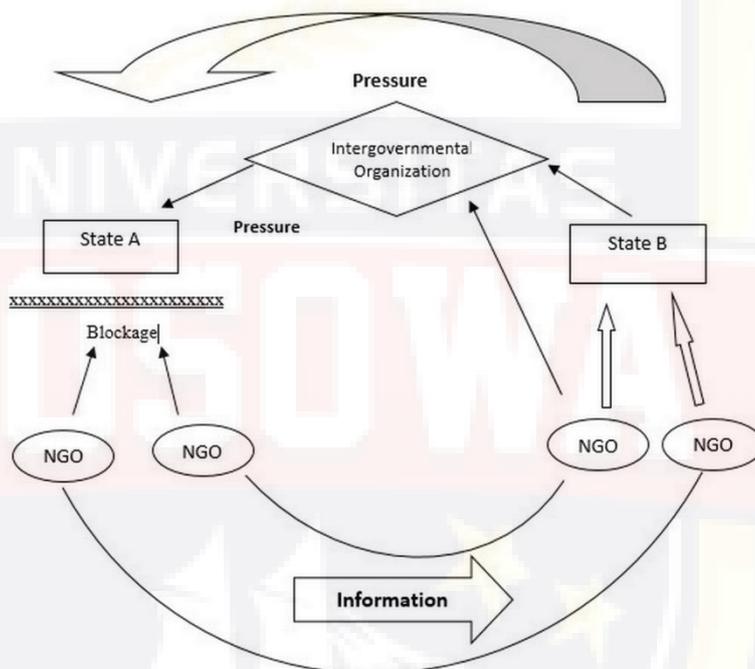
Kelompok yang terdapat pada jaringan saling berbagi nilai (*value*) dan sering bertukar informasi. Aliran informasi diantara para aktor dalam jaringan ini memiliki koneksi yang padat baik formal maupun informal. Selain bertukar informasi, kelompok dalam jaringan membuat kategori untuk mengatur dan menghasilkan informasi yang menjadi dasar dari kampanye mereka. Kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat, dan menyebarkannya secara efektif merupakan hal yang paling bernilai mereka. Kemunculan TAN diinisiasi oleh tiga faktor, yaitu *Boomerang Pattern*, *activist* atau *political entrepreneurs*, dan *international conference* (Keck & Sikkink, 1998).

1. Boomerang Pattern

Peran pemerintah adalah “menyediakan” dan “menjamin” hak-hak dari masyarakat, namun pemerintah juga bisa lalai dalam menjalankan peran utamanya. Ketika pemerintah tidak mampu memberikan hak-hak

masyarakat tersebut, maka kelompok maupun individu pun tidak punya jalan dalam perpolitikan dan peradilan dalam negeri. Untuk melindungi hak-hak tersebut, mereka kemungkinan mencari koneksi internasional melalui jaringan advokasi transnasional untuk membantu mereka mengkampanyekan isu yang sedang mereka perjuangkan kepada

Model *Boomerang pattern*
Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink



Sumber: (Keck & Sikkink, 1998)

pemerintah. Untuk memahami gambaran jaringan ini, Keck & Sikkink menawarkan model yang disebut dengan *Boomerang Pattern* (Keck & Sikkink, 1998).

Pola bumerang ini muncul ketika diblokirnya hubungan aktor domestik dengan negara oleh negara itu sendiri, lalu LSM domestik langsung mencari sekutu internasional untuk membantu mereka

memberikan tekanan dari luar kepada negaranya, boomerang pattern muncul sebagai pola interaksi antar aktor dalam TAN. (Keck & Sikkink, 1998).

Keck & Sikkink membagi 4 strategi dalam TAN yang bisa digunakan untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu : *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

2. Information Politics

Information politics atau politik informasi adalah kemampuan aktor nonnegara untuk mengolah informasi berdasarkan fakta dan kesaksian yang diubah kedalam beragam bentuk media seperti E-mail, buletin, pamflet, dan website dan disebar untuk menghasilkan pengaruh besar yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang akan menjadi pendorong mereka untuk melakukan aksi sekaligus memperkuat gerakan itu sendiri. (Keck & Sikkink, 1999).

Informasi merupakan pengikat anggota jaringan dan merupakan hal sangat penting untuk efektifitas jaringan. Pertukaran informasi yang mereka lakukan kebanyakan bersifat informal melalui panggilan telepon, email, faks, buletin, dan pamflet. Mereka memberikan informasi yang kemungkinan tidak tersedia, dari sumber yang mungkin tidak terdengar, dan mengolah menjadi informasi yang mudah dipahami publik dan berguna bagi para aktivis yang jauh secara geografis. (Keck & Sikkink, 1999). Aktor nonnegara berperan sebagai

sumber informasi alternatif, para aktor ini tidak hanya memberikan fakta, tetapi juga kesaksian atau cerita oleh orang-orang yang hidupnya telah terpengaruh. Setelah itu, aktor-aktor ini menafsirkan fakta dan kesaksian tersebut dengan membingkainya secara sederhana dalam hal benar dan salah dengan tujuan untuk membujuk orang-orang dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. (Keck & Sikkink, 1999).

Mitra penting kedua dalam *information politik* adalah media, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, jaringan berusaha untuk menarik perhatian pers. Wartawan yang simpatik juga dapat menjadi bagian dari jaringan, meskipun yang lebih sering memupuk reputasi kredibilitas pers dan mengemas informasi mereka dengan cara yang dramatis dan tepat waktu adalah aktivis jaringan. (Keck & Sikkink, 1999).

3. Symbolic Politics

Symbolic politics atau politik simbolik merupakan kemampuan untuk membingkai suatu masalah dari hasil identifikasi dan memberikan penjelasan yang konkret suatu dengan tujuan menggambarkan situasi yang sedang terjadi melalui peristiwa simbolik. (Keck & Sikkink, 1999).

Interpretasi simbolik adalah bagian proses persuasi dimana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen. Dalam melakukan strategi *symbolic politics* ini biasanya sebuah gerakan ataupun NGO melakukannya di waktu-waktu tertentu yang ada

hubungannya dengan isu yang sedang mereka angkat, selain itu mereka juga biasanya melakukan aktivitas tertentu yang dapat menggambarkan isu yang mereka angkat, kemudian ditambah dengan para jaringan juga membuat tulisan atau artikel terkait isu yang mereka angkat. Tujuannya adalah untuk memberitahu isu yang sedang mereka perjuangkan dan juga untuk membuat pihak-pihak tertentu yang posisinya berada jauh secara geografis tertarik dengan isu tersebut. (Keck & Sikkink, 1999).

4. Leverage Politics

Levergae politics merupakan mencari dan mendatangkan aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi situasi ataupun masyarakat luas dengan cara membujuk aktor yang lebih kuat pengaruhnya disaat anggota jaringan yang lebih lemah tidak dapat memberikan pengaruh. (Keck & Sikkink, 1999).

Aktivis dalam jaringan advokasi sering prihatin dengan efektivitas politik mereka. Efektivitas mereka sering menghasilkan beberapa perubahan oleh aktor target yang dalam hal ini mungkin pemerintah, atau pun aktor swasta seperti perusahaan transnasional. Untuk menghasilkan sebuah perubahan kebijakan, jaringan perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat. Dan untuk mendapatkan pengaruh, jaringan mencari “*leverage*” atau “manfaat” dari aktor yang lebih kuat tersebut. Dengan mengarahkan pengaruh atas institusi yang lebih kuat, kelompok-kelompok jaringan lemah akan memperoleh pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk menekan praktik-praktik negara

secara langsung. Mengidentifikasi poin *leverage* merupakan langkah yang strategis penting dalam kampanye jaringan. (Keck & Sikkink, 1999).

Terdapat 2 jenis *leverage*: *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* adalah pengaruh material yang berbentuk uang atau barang, atau hal-hal lain yang berbentuk keuntungan untuk jaringan seperti di isu ekonomi, militer, ataupun hubungan kerjasama. Sedangkan *moral leverage* adalah pengaruh moral yang mengarah kepada hal yang disebut *mobilization of shame* atau upaya jaringan advokasi untuk menjadi gerak-gerak aktor target sebagai pusat sorotan internasional. (Keck & Sikkink, 1999).

5. Accountability Politics

Accountability politics atau akuntabilitas politik merupakan upaya untuk menjaga dan mengawasi aktor target atau pemerintah untuk tetap pada kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan mereka, dan juga kemampuan untuk mempertahankan aktor-aktor yang memiliki pengaruh sebelumnya untuk tetap pada prinsip bersama ketika isu yang diadvokasikan telah mencapai tujuannya. (Keck & Sikkink, 1999)

Jaringan menggunakan strategi ini jika aktor target dalam hal ini pemerintah setuju dan berkomitmen untuk mengubah kebijakan atau perilaku agar sejalan dengan isu yang diadvokasikan. Dengan begitu, jaringan punya kesempatan dalam politik akuntabilitas agar bisa mengawasi wacana dan praktik pemerintah atas komitmen yang

diberikan. Strategi ini memiliki tujuan untuk menjamin implementasi dari perubahan hukum yang pemerintah lakukan agar berjalan sesuai dengan komitmen yang ada, karena biasanya pemerintah sering membuat komitmen dengan maksud mengalihkan perhatian publik semata. (Keck & Sikkink, 1999).



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Rasisme dan Gerakan Anti Rasisme di Amerika Serikat

1. Rasisme di Amerika

Rasisme adalah suatu bentuk penindasan yang terjadi secara sistematis, yang artinya hal ini dilakukan secara bersamaan oleh suatu ras atau bangsa terhadap ras atau bangsa yang lain. Biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan keberadaan ras atau bangsa yang tidak diinginkan tersebut karena dianggap bukan ras murni atau karena jumlah populasi mereka yang minoritas di suatu wilayah tertentu, atau karena pemahaman yang turun temurun menganggap ras atau bangsa tersebut sebagai musuh. (Henry PJ & David Sears, 2003).

Rasisme ini telah terjadi bahkan sebelum masa kapitalisme muncul yaitu sejak tahun 1525. Rasisme ini diterapkan sebagai akibat dari kekalahan perang, dan ini dilakukan melalui sistem perbudakan. Pihak yang menang perang akan menjadikan pihak yang kalah perang sebagai budaknya. Pada tahun 1600an disaat kapitalisme muncul, rasisme pun menyusul sebagai akibat dari peperangan sekaligus menjadi hal yang tertanam dalam struktur kebudayaan yang akhirnya menjadi turun temurun. (Middleton, 2020)

Lalu disaat para pedagang Eropa sadar posisi mereka telah menjadi negara yang memimpin kekuatan militer pasca perang dingin, mereka memiliki persenjataan seperti senjata api dan juga kapal yang mereka

gunakan untuk menjajah Afrika dan menjadikan masyarakat Afrika sebagai budak sekaligus menguasai kekayaannya. Amerika menyebarkan pemahaman bahwa Afrika tidak memiliki sejarah sebelum Amerika datang, mereka menyebarkan bahwa Afrika selama ini hidup dalam kesengsaraan dan Amerika datang untuk menyelamatkan kondisi mereka. (Henry PJ & David Sears, 2003)

Di tahun 1790, eksistensi rasisme diperburuk karena diberlakukannya kebijakan keseragaman pertama kali di Amerika. Sistem kebijakan ini mengatur kewarganegaraan Amerika Serikat yang berdasar pada kenaturalisasian, naturalisasi ini ditujukan kepada warga kulit putih yang merdeka. Sehingga warga asli Amerika, para budak, orang-orang kulit hitam yang merdeka, dan orang-orang Asia tidak punya hak kewarganegaraan. Dan kebijakan inilah yang akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan orang-orang yang tinggal di Amerika. Karena pada dasarnya, pemenuhan hak-hak oleh negara kepada warganya itu hanya bisa diberikan jika memiliki status kewarganegaraan. Tentu saja akibat dari hal ini adalah lebih menjamin keberlangsungan praktik rasisme itu sendiri, karena dalam aspek politik misalnya, orang-orang yang bisa menggunakan hak untuk memilih dan mencalonkan diri adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang mayoritasnya itu adalah orang-orang kulit putih yang merdeka. Kursi-kursi di pemerintahan pun akan selalu diduduki oleh orang-orang kulit putih yang punya

kewarganegaraan itu. Pemerintahan seperti ini kemudian menghasilkan berbagai kebijakan-kebijakan yang juga akan dipengaruhi oleh faktor ras atau bangsa itu kembali, karena bermula dari pemilihan umum yang berkaitan dengan ras atau bangsa itu sendiri, bukan melalui kompetensi dari masing-masing individu.

Demikian pula dengan hak sebagai warga sipil, seperti hak diperlakukan adil di hadapan hukum. Salah satu yang menjadi bukti peristiwa sejarah di Amerika Serikat yang bisa kita jadikan tolak ukur adalah kasus 'Militia Acts' yang terjadi di tahun 1792. Dimana pada saat itu pemerintah membuka kesempatan untuk bergabung dengan 'Militia Acts' atau Angkatan Bersenjata dengan cara menyebarkan informasi perekrutan tersebut melalui media massa berupa surat kabar, dan dengan jelas tertulis persyaratan bahwa "hanya kulit putih yang diperbolehkan berpartisipasi". (Henry PJ & David Sears, 2003)

Bersamaan dengan hal tersebut, muncul juga sebuah aturan yaitu "*anti-miscegenation laws*" yang berlaku hingga tahun 1967, aturan ini melarang pernikahan dan hubungan seksual antara orang kulit putih dan kulit hitam, dan ini juga berlaku terhadap masyarakat Indian dan Asia. Kebijakan ini dibuat dalam rangka untuk menutup kemungkinan terjadinya distribusi horizontal ataupun vertikal dari kulit hitam ke dalam kedudukan kulit putih karena alasan keturunan atau lainnya.

Lalu di tahun 1870, kebijakan mengenai naturalisasi tadi sedikit di ubah, perubahan itu memperbolehkan kulit hitam untuk memiliki

kewarganeraan tapi tidak bagi ras lain seperti Indian dan Asia. Mereka berkata bahwa ras lain itu merupakan makhluk asing yang tidak pantas untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hal ini sebenarnya merujuk pada imigran Jepang dan China. Meskipun orang-rang kulit hitam sudah mendapatkan status kewarganegaraannya, Amerika tetap masih melakukan diskriminasi kepada orang-orang kulit hitam bahkan sampai pada tahap pembantaian di wilayah Amerika Selatan.

Masyarakat Amerika asli alias suku Indian, setelah memperjuangkan haknya pada tahun 1924 dan mampu mendapatkan status kewarganegaraannya. Namun meskipun demikian, kondisi suku Indian tidak jauh berbeda dengan masyarakat kulit hitam, status kewarganegaraan mereka tidak menjamin akses mereka untuk ikut berpartisipasi dalam politik hingga tahun 1948. Berdasarkan survei dari Department of Interior, sampai pada tahun 1938, terdapat 7 negara di wilayah Eropa yang menolak orang Indian untuk turut serta dalam memilih. (Henry PJ & David Sears, 2003)

2. Gerakan Anti Rasisme di Amerika

Pada tahun 1950, ada sebuah gerakan yang terkenal, yaitu gerakan Hak Sipil atau *Civil Right Movement*. *Civil Right Movement* adalah gerakan yang ditujukan untuk meniadakan diskriminasi rasial serta memulihkan hak-hak suara yang setara untuk orang-orang kulit hitam di Amerika. Gerakan ini berlangsung dari tahun 1955 sampai tahun 1968, selama periode waktu ini, terjadi gelombang besar

aktivisme di Amerika demi memberantas diskriminasi dan ketidakadilan. Para aktivis gerakan ini bekerjasama dengan melakukan protes tanpa kekerasan serta tindakan yang lebih spesifik terhadap perlawanan sipil yang di targetkan. (www.history.com, 2009)

Di tahun yang sama juga terjadi sebuah kasus yang cukup terkenal yaitu kasus seorang wanita berkulit hitam bernama Rosa Park yang mendapatkan perlakuan rasis di dalam bus. Di tahun ini, hukum yang berlaku adalah hukum Jim Crow. Hukuman Jim Crow ini adalah hukum dari Negara bagian tetapi di terapkan di Amerika pada rentang waktu 1876 hingga 1965 dengan aturan yang berbunyi "*Separate but equal*" terhadap orang berkulit hitam, yang salah satu hukumnya mengatur tentang pembagian tempat duduk di bus. (Andrew, 2019). Rosa Park yang saat itu sedang duduk di dalam bus tidak ingin memberikan kursinya kepada pria berkulit putih dan kemudian pria tersebut mempermasalahkannya. Tetapi, supir bus tersebut memaksa Rosa Park untuk memberikan menyerahkan tempat duduknya. Setelah Rosa Park menolak, polisi pun datang dan menangkap Rosa Park kemudian dimasukkan kedalam penjara. Hukum yang berlaku pada saat itu menyatakan bahwa ketika di dalam bus bangku kulit putih dan berwarna penuh, maka orang kulit hitam harus memberikan kursinya kepada orang kulit putih. Ini merupakan bukti kecil rasisme yang menandakan orang kulit putih merasa superior di atas orang-orang kulit hitam. (Oxford University, 2014).

Ketika berita tentang penangkapan Rosa Parks menyebar dan membuat komunitas orang kulit hitam naik pitam, para pemimpin komunitas kulit hitam membentuk Montgomery Improvement Association (MIA) yang dipimpin oleh pendeta Martin Luther King Jr. yang juga berperan sebagai pejuang hak-hak sipil garis depan. Komunitas orang kulit hitam menganggap semua bus di wilayah Montgomery merupakan simbol ketidakadilan, penghinaan, dan ketidaksetaraan. Rosa Parks berhasil dalam memprovokasi MIA untuk melakukan boikot sistem bus Montgomery yang berlangsung selama 381 hari. Kemudian pada tanggal 5 Desember 1954, presiden MIA terpilih menjadi juru bicara aksi boikot yang dilakukan oleh kaum kulit hitam. (www.history.com, 2009).

Pada tanggal 17 Mei 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan sebuah keputusan yaitu *Brown v. Board of Education*, keputusan ini menyatakan bahwa semua undang-undang yang menetapkan sekolah terpisah menjadi inkonsistensial, dan menyerukan desegrasi semua sekolah di seluruh negeri. Pengeluaran kebijakan ini dipicu oleh sebuah kasus pada tahun 1952 ketika sistem sekolah umum di Topeka, Kansas, menolak untuk mendaftarkan putri dari penduduk kulit hitam lokal, yaitu Oliver Brown di sekolah dasar yang paling dekat dengan rumah mereka saat itu. Keluarga Oliver Brown dan 12 keluarga kulit hitam lokal lainnya yang mengalami situasi serupa akhirnya mengajukan gugatan *Class Action* di pengadilan federal Amerika

terhadap Dewan Pendidikan Topeka, mereka mengatakan bahwa kebijakan pemisahan di sistem sekolah itu tidak konstitusional. *Calss Action* adalah jenis gugatan dimana salah satu pihak merupakan sekelompok orang yang diwakili secara kolektif oleh anggota kelompok itu. Namun Pengadilan Distrik Amerika Serikat menolak gugatan Oliver Brown dengan dalih bahwa segregasi rasial dengan sendirinya bukanlah sebuah pelanggaran. Tetapi keluarga Oliver Brown yang diwakili oleh National Association for the Advancement of Colored People atau NAACP mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas keputusan tersebut. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan *Brown v. Board of Education*, NAACP mencoba mendaftarkan siswa kulit hitam di sekolah-sekolah yang sebelumnya hanya menerima siswa kulit putih di kota-kota seluruh Amerika Selatan. (www.history.com, 2009).

Kemudian pada tahun 1957, NAACP telah mendaftarkan 9 siswa kulit hitam untuk menghadiri Little Rock Central High yang sebelumnya hanya dihadiri oleh siswa kulit putih. Lalu pada bulan september 1957, Arkansas National Guard dipanggil untuk menjaga perdamaian disekolah tersebut, mereka diperintah oleh Gubernur Orval Faubus untuk mencegah siswa kulit hitam masuk karena klaim bahwa terjadi kerusuhan dan pelanggaran perdamaian di integrasi. Untungnya, Presiden Dwight D. Eisenhower langsung turun tangan dan memerintahkan pasukan federalnya untuk mengawal ke-9 siswa kulit

hitam ini ke kelas mereka. Mereka disebut sebagai The Little Rock Nine karena mereka berjumlah 9 orang dan pendaftaran mereka disekolah diikuti oleh Little Rock Crisis. (www.history.com, 2009).

Pada tahun yang sama, Presiden Eisenhower juga menandatangani *Civil Right Act* tahun 1957, yang menjadi undang-undang hak-hak sipil besar pertama sejak rekonstruksi. Undang-undang ini memungkinkan bagi federal untuk dituntut bagi siapa saja yang mencoba mencegah seseorang untuk memilih. Meskipun kebijakan ini memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat kulit hitam, tetapi mereka masih saja mengalami perlakuan diskriminasi di kehidupan sehari-hari mereka. Seperti pada tahun 1960, 4 orang mahasiswa yang menentang segregasi di Greensboro, Carolina Utara. Keempat mahasiswa ini menolak untuk beranjak dari konter makan siang Woolworth tanpa dilayani. Selang beberapa hari berikutnya, ratusan orang bergabung dalam sebuah aksi yang dikenal sebagai *Sit-In Greensboro Woolworth*. Dalam aksi ini beberapa aktivis ditangkap dan didakwa melakukan pelanggaran, akibatnya para pengunjung rasa kemudian melakukan boikot terhadap semua konter makan siang yang terpisah sampai pemiliknya menyerah dan empat mahasiswa tadi dilayani di konter makan siang Woolworth yang merupakan tempat mereka pertama kali berdiri. Upaya keempat mahasiswa ini dalam memelopori aksi duduk damai dan demonstrasi di berbagai kota serta membentuk *Student Nonviolent Coordinating Committee* atau SNCC untuk mendorong semua mahasiswa yang

terlibat dalam *Civil Right Movement*. Hal ini menarik perhatian Stokely Carmichael, seorang sarjana muda yang bergabung dengan SNCC di tahun 1964 yang sekaligus mendaftarkan orang-orang kulit hitam untuk bisa menggunakan hak suaranya di Mississippi. Kemudian pada tahun 1966, Carmichael menjadi ketua SNCC yang memberikan pidato yang dikenal dengan “Black Power”. (www.history.com, 2009).

Pada tahun 1961, terbentuk sebuah kelompok aktivis yang beranggotakan 13 orang, mereka terdiri dari 7 orang aktivis kulit hitam dan 6 orang aktivis kulit putih, mereka dikenal sebagai *Freedom Riders*. Kelompok ini berusaha untuk menguji keputusan Mahkamah Agung di *Boynton v. Virginia* tahun 1960 tentang pemisahan fasilitas transportasi antar negara bagian, termasuk didalamnya terminal bus yang juga tidak konstitusional. Sebuah insiden mengerikan yang menimpa *Freedom Riders* terjadi tepat pada Hari Ibu yaitu tanggal 14 Mei 1961, kejadian tersebut bermula ketika rombongan kelompok ini melakukan perjalanan dengan menaiki bus, saat bus tiba di Anniston, Alabama, disana terdapat sekitar 200 orang massa berkulit putih yang mengepung bus, para massa ini menaiki bus bahkan melempar bom ke dalamnya. Para penumpang bus alias *Freedom Riders* pun menyelamatkan diri dengan keluar dari bus, tetapi saat tiba diluar bus mereka malah di pukul habis-habisan oleh massa yang menunggu mereka diluar. Menanggapi kejadian ini, Gubernur Alabama, John Patterson mencari pengemudi bus alternatif sekaligus menugaskan polisi untuk mengawal

perjalanan mereka pada tanggal 20 Mei. Namun pengawalan polisi Alabama berhenti saat bus yang dinaiki *Freedom Riders* ini tiba di Montgomery, selepas pengawalan polisi Alabama, bus kembali diserang secara brutal oleh segerombolan orang kulit putih. Dalam merespon kejadian ini, Jaksa Agung Kennedy akhirnya mengirimkan petugas federal ke Montgomery. Lalu pada tanggal 24 Mei 1961, kelompok *Freedom Riders* akhirnya tiba di Mississippi. Di Mississippi mereka di sambut dengan ratusan pendukung, tetapi kemalangan menimpa mereka, dimana mereka ditangkap karena masuk tanpa izin di fasilitas “whites-only” atau “khusus orang kulit putih” dan dijatuhi hukuman 30 hari penjara. Akan tetapi kasus ini segera mendapat penyelesaiannya ketika pengacara NAACP (*National Association for the Advancement of Colored People*) membawa masalah ini ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang berujung dengan pembatalan vonis yang menimpa kelompok *Freedom Riders*. Akhirnya tepat pada musim gugur tahun 1961, *Interstate Commerce Commission* mengeluarkan kebijakan yang melarang pemisahan di terminal transit antar negara bagian. (www.history.com, 2009).

Di wilayah Amerika bagian Selatan, aktivis melakukan pengorganisasian dengan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bekerjasama dan mendukung komitmen mereka terhadap kebebasan dan kesetaraan yang mereka perjuangkan. Seperti pada tanggal 28 Agustus 1963, terdapat 250 ribu orang Amerika berbondong-bondong

datang ke Washington DC untuk berpartisipasi dalam Pawai untuk Pekerjaan dan Kebebasan di sana. (www.history.com, 2017)

Lalu di tahun 1964, *Civil Right Act* di tandatangani oleh presiden Lyndon B. Johnson, undang-undang ini menjamin pekerjaan yang setara untuk semua orang, membatasi penggunaan tes literasi pemilih, dan mengizinkan otoritas federal untuk memastikan fasilitas publik terintegrasi. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1965, *Civil Right Movement* di Alabama mengalami sebuah insiden yang sangat mengerikan. Kejadian ini bermula pada saat sekitar 600 orang demonstran berpartisipasi dalam pawai Selma ke Montgomery dalam rangka protes atas pembunuhan seorang aktivis kulit hitam bernama Jimmie Lee Jackson oleh seorang polisi kulit putih. Ketika para demonstran mendekati jembatan Edmund Pettus, mereka dihadang oleh gabungan barisan polisi Alabama dan polisi lokal atas perintah Gubernur Alabama George C. Wallace. Namun hal ini tidak menghentikan langkah para demonstran yang terus bergerak maju, namun para polisi ini melakukan tindakan brutal dengan memberikan gas air mata bahkan memukul para pendemo yang menyebabkan puluhan pengunjung rasa di rawat di rumah sakit. Seluruh kejadian ini disiarkan di televisi yang dikenal dengan "*Bloody Sunday*". (www.history.com, 2009).

Pada tahun yang sama *Voting Right Act* disahkan. (www.kompas.com, 2019). Setelah disahkannya *Voting Right Act* pada

tahun 1965, seharusnya ini sudah bisa menjadi penanda bahwa rasisme di Amerika dianggap telah usai. Namun pada kenyataannya praktik rasisme masih saja terjadi dan berlangsung sampai saat ini.

B. Black Lives Matter Global Network Foundation dan Gerakan Anti Rasisme Global

1. Black Lives Matter Global Network Foundation

Budaya rasisme yang tidak kunjung usai, kemudian melahirkan gerakan anti rasisme lain yang salah satunya adalah gerakan *Black Lives Matter* yang diorganisir oleh organisasi bernama Black Lives Matter Global Network Foundation atau BLMGNF.

BLMGNF adalah sebuah organisasi utama dari gerakan *Black Lives Matter* yang lebih terdesentralisasi, organisasi ini bergerak untuk mengorganisir serta melanjutkan para aktivis dalam gerakan *Black Lives Matter* di berbagai kota. Organisasi ini didirikan oleh 3 aktivisi perempuan yaitu Patrisse Cullor, Alicia Garza, dan Opal Tometi pada tahun 2013 sebagai tanggapan atas dibebaskannya George Zimmerman atas kasus pembunuhan penembakan terhadap Trayvon Martin yang masih berusia 17 tahun di Sanford, Florida. (www.blacklivesmatter.com, 2019). Organisasi ini sifatnya internasional yang dibuat dengan maksud sebagai wadah advokasi pemberantasan rasisme yang sistematis sekaligus untuk mencegah kekerasan yang dilakukan oleh polisi. (www.stlamerican.com, 2020).

Keberadaan organisasi ini adalah sebagai jejaring internasional yang sifatnya desentralisasi dari cabang-cabang lokal yang ada. Berdasarkan dari situs web BLMGNF, terdapat lebih dari 40 cabang yang tersebar di seluruh dunia. (www.blacklivesmatter.com, 2019). Dan setiap cabang lokal dibebaskan untuk berorganisasi secara internal tetapi tidak melenceng dari prinsip-prinsip BLMGNF yang telah ditetapkan. Pendanaan cabang-cabang lokal sebagian besar didapatkan melalui sumbangan, namun cabang-cabang lokal ini juga bisa mengajukan permintaan dana ke BLMGNF.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, BLMGNF mengumumkan 2 organisasi cabang baru mereka ke publik, yaitu Black Lives Matter Political Action Committee (BLM PAC) yang bertugas sebagai pendukung perubahan secara politik, dan Black Lives Matter Geassroots (BLM Grassroots) yang bertugas sebagai pelanjut aksi dari cabang-cabangnya, sedangkan BLMGNF akan berfungsi sebagai badan penggalangan dana, pemberi hibah, penguat, dan wadah pemikir gerakan yang berorientasi aksi. (www.blacklivesmatter.com, 2020). Sumber dana BLMGNF sendiri didapatkan melalui donasi dan hibah oleh Black Lives Matter Support Fund, ini merupakan sebuah acara yang diadakan melalui platform donasi Tides setiap tanggal 2 Juli. (www.tides.org, 2020).

BLMGNF mengklaim bahwa misi organisasi mereka secara umum sama dengan misi gerakan Black Lives Matter yaitu untuk membangun

kekuatan lokal dan untuk ikut terlibat kedalam diskriminasi terhadap komunitas kulit hitam yang dilakukan oleh negara dan masyarakatnya, atau dengan kata lain BLMGNF dan gerakan Black Lives Matter yang mengadvokasi perlawanan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh badan penegak hukum seperti polisi terhadap orang-orang kulit hitam. (www.blacklivesmatter.com, 2020).

2. Gerakan Anti Rasisme Global

Gerakan anti rasisme global adalah gerakan sosial politik yang berfokus menyoroti rasisme, diskriminasi, dan ketidaksetaraan terhadap kelompok ataupun ras tertentu yang cakupannya di seluruh dunia. Black Lives Matter adalah salah satu dari beberapa gerakan anti rasisme global yang ada saat ini, Black Lives Matter merupakan gerakan politik dan sosial yang terdesentralisasi yang juga berfokus untuk memberantas praktik rasisme, diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kulit hitam. Kebanyakan kasus yang diangkat oleh aktivis Black Lives Matter adalah insiden kebrutalan polisi dan kekerasan bermotif rasial yang dilakukan terhadap orang kulit hitam. (www.bbc.com, 2021). Aktivis gerakan Black Lives Matter ini diorganisir oleh organisasi BLMGNF.

Gerakan Black Lives Matter ini bermula pada tahun 2013 dengan menggunakan sebuah tagar di media sosial berupa Twitter yaitu #BlackLivesMatter yang di unggah oleh salah satu pendiri BLMGF yaitu Patrisse Cullors setelah dibebaskannya George Zimmerman atas

kasus penembakan yang membunuh remaja kulit hitam, Trayvon Martin. Gerakan Black Lives Matter telah diakui secara nasional di Amerika setelah melakukan demonstrasi atas kasus kematian seorang orang kulit hitam pada tahun 2014, yaitu kematian Michael Brown di Ferguson. (www.cbsnews.com, 2015). Pasca demonstrasi ini gerakan Black Lives Matter kemudian melakukan banyak lagi demonstrasi untuk menentang kematian orang-orang kulit hitam lain yang dilakukan oleh polisi.

Kemudian pada tahun 2020, gerakan Black Lives Matter kembali menjadi perbincangan di berbagai media nasional bahkan internasional terkait protes global atas kematian George Floyd yang dibunuh oleh seorang petugas kepolisian Minneapolis yaitu Derek Chauvin. (www.france24.com, 2020). Di Amerika sendiri terdapat sekitar 15 juta hingga 26 juta orang yang ikut berpartisipasi dalam protes Black Lives Matter 2020, hal ini menjadikan gerakan Black Lives Matter sebagai salah satu gerakan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. (www.nytimes.com, 2020). Selain di Amerika, gelombang protes Black Lives Matter ini juga terjadi di beberapa negara lain, diantaranya Australia yang menggunakan slogan Black Lives Matter untuk mengangkat masalah lokal mereka yaitu kematian suku Aborigin dalam penjara, (www.theguardian.com, 2020), di Kanada yang mengangkat kasus kematian D'Andre Campbell yang memicu protes Black Lives Matter dengan tuntutan pemberhentian layanan polisi. (www.cbc.ca,

2020), dan protes juga di Brazil, Denmark, Perancis, Jerman, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris.



BAB IV

ANALLISA DAN PEMBAHASAN

A. Transnasionalisasi Isu BLM (2013-2020)

Pada tahun 2013, salah satu pendiri BLMGNF, Patrisse Cullors menggunakan taggar *#BlackLivesMatter* di akun media sosialnya berupa Twitter sebagai bentuk pembelaan terhadap kasus penembakan remaja kulit hitam oleh George Zimmerman yang merupakan seorang polisi.

Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2014 di Amerika, dimana seorang yang bernama Michael Brown juga meninggal karena kasus rasial karena berkulit hitam, dan kejadian ini direspon dengan gerakan Black Lives Matter dalam bentuk aksi demonstrasi sebagai bentuk menentang tindakan rasial tersebut yang juga dilakukan oleh seorang polisi.

Pada tahun 2015 terjadi penembakan oleh seorang polisi di Kanada dimana menewaskan 2 orang pria berkulit hitam di wilayah metropolitan Kanada, kedua orang itu bernama Andrew Loku dan Jermaine Carby. (globalnews.ca, 2015) Akibat kejadian ini, pengunjung rasa BLM menutup jalan tol Allen Road di Toronto sebagai bentuk aksi protes terhadap kematian 2 pria kulit hitam tersebut.

Tak kala menakjubkan lagi, aksi protes gerakan BLM dihadiri oleh 3.500 orang yang terjadi pada bulan Juli 2016 di Australia. Dalam aksi tersebut, seorang wanita Aborigin, Yarramun Conole yang juga salah satu penyelenggara aksi tersebut mengatakan bahwa “sebagai wanita Aborigin ketika saya berpikir tentang BLM, saya juga berpikir tentang kematian orang-orang Aborigin dalam tahanan, karena sampai saat ini terdapat sekitar

300 orang kulit hitam yang mati dalam tahanan dan itu mengerikan”. Aksi ini dipicu karena peristiwa penganiayaan terhadap ratusan warga suku Aborigin dalam tahanan polisi, bahkan terdapat 300 yang meninggal secara mengerikan dalam tahanan. Di tahun yang sama juga terjadi aksi di Kanada, aksi ini dinamakan sebagai Aksi Duduk untuk menghalangi parade agar tidak bergerak maju selama kurang lebih 30 menit karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pride Toronto terhadap LGBTQ kulit hitam, olehnya keluar beberapa tuntutan diantaranya meminta agar pendanaan dan dukungan logistik stabil untuk kelompok LGBTQ. Karena maraknya tindakan rasial di Kanada sehingga di tahun 2016 Kanada mengadopsi UNDRIP serta pada tahun 2017 juga diadakan pelatihan anti rasisme wajib di semua tingkat dewan di Toronto, sebagai bentuk respon kasus rasial yang merajalela.

Aksi gerakan BLM ini tidak lagi hanya dilakukan dengan cara protes dalam bentuk demonstrasi maupun menulis tagar di media sosial tapi juga digaungkan melalui seni. Pada tahun 2018, dimana seniman dari Virginia memamerkan karya seninya di layar eksterior besar (jumbotron) di Perpustakaan Cabell Universitas Virginia Commonwealth yang didalamnya terdapat karya seni Black Lives Matter yang merepresentasikan pembelaannya terhadap kehidupan orang kulit hitam.

Meskipun gerakan BLM telah marak digaungkan oleh aktivis-aktivis BLM, akan tetapi juga masih terjadi intimidasi terhadap orang kulit hitam. Pada tahun 2020, seorang warga Amerika yang berkulit hitam di aniaya oleh

seorang polisi, parahnya tragedi tersebut divideo oleh seorang polisi dan disebarluaskan di media sosial. Dalam video tersebut terdengar seorang George Floyd memohon agar lehernya dilepaskan dari lutut polisi yang menekannya hingga kesulitan bernapas dan peristiwa tersebut membuat George Floyd meninggal seketika. Tindakan polisi tersebut, menuai kecaman dari para aktivis BLM di berbagai negara. Misalnya di Amerika, Australia, Brazil, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris melakukan unjuk rasa seperti demonstrasi, menggunakan tagar #blacklivesmatter, dan menyebarkan petisi, sebagai bentuk pembelaan terhadap George Floyd dan pengecaman terhadap ketiga polisi itu, tidak ketinggalan juga Australia dan Kanada melakukan kecaman terhadap tindakan ketiga polisi tersebut.

Australia sendiri melakukan aksi protes di seluruh Australia diantaranya di Sydney yang dihadiri sekitar 20.000 pengunjung rasa, di Melbourne sekitar 10.000 pendemo, di King George Square di CBD Brisbane sekitar 10 ribu pengunjung rasa, di Canberra sekitar lebih dari 300 orang pendemo. (www.abc.net.au, 2020). Sedangkan di Kanada merespon kekejaman ketiga polisi tersebut dengan hal yang sama yaitu melakukan aksi protes di 10 Provinsi diantaranya Alberta, British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Prince Edward Island, Saskatchewan, dan Newfoundland and Labrador, dan 3 wilayah diantaranya Nunavut, Yukon, dan Northwest Region, dengan total sekitar 100 ribu pengunjung rasa.

B. Transnasionalisasi Gerakan BLM

Berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada konsep *Transnational Advocacy Network's* oleh Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink strategi yang digunakan BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan BLM terbagi menjadi strategi formal (*Leverage Politics* dan *Accountability Politics*), dan strategi informal (*Information Politics* dan *Symbolic Politics*). Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pola strategi transnasionalisasi gerakan BLM pada 2 negara, yaitu Kanada dan Australia.

1. Formal

Strategi formal yang digunakan oleh BLMGNF pada penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Jaringan Advokasi BLMGNF dalam hal ini telah mencapai *Leverage Politics*, yang dibagi menjadi dua yaitu *Moral Leverage* dan *Material Leverage*.

Moral Leverage telah terpenuhi pada jaringan advokasi BLM Cabang Kanada dan Australia dimana dengan dikeluarkannya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang dimana ini merupakan upaya PBB dalam menentang ketidakadilan terhadap Penduduk Asli Australia dan Penduduk Asli Kanada. Hak-hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah adat, hak atas sejarah, bahasa dan tradisi lisan, hak untuk mendapatkan ganti rugi. Pada jaringan advokasi BLM Cabang Kanada juga telah memenuhi *Material*

Leverage dengan dikeluarkannya tuntutan terkait pendanaan dan dukungan logistik untuk kelompok Black Queer Youth.

Jaringan Advokasi BLMGNF dalam hal ini telah mencapai *Accountability politics*, dimana dikeluarkannya Undang-Undang Domestik Amerika yaitu H.R. 40 – 117th Congress yang berisi tentang pembelaan terhadap perbudakan dan diskriminasi orang-orang kulit hitam di Amerika. Undang-Undang ini dikeluarkan atas desakan dari PBB karena adanya berita kematian George Floyd di media internasional yang disebarakan oleh BLMGNF. Selain dikeluarkannya Undang-Undang Domestik Amerika tersebut, Amerika juga membentuk Lembaga Nasional HAM dan Koordinator Senior HAM. Pada *Accountability politics* jaringan BLM Cabang Australia ditandai dengan ditandatangani dan disetujuinya beberapa tuntutan BLM Cabang Australia, yaitu: pemerintah Australia Selatan berkomitmen untuk mendanai layanan pemberitahuan hak asuh untuk memastikan semua orang Aborigin yang memasuki tahanan polisi memiliki akses ke Layanan Hukum Aborigin pada Juli 2020 dan inisiasi penyelidikan parlemen NSW tentang bagaimana kematian First Nations dalam tahanan diselidiki.

Kemudian pada jaringan BLM Cabang Kanada juga telah mencapai *Accountability politics* dengan pengakuan rasisme dan klasisme anti-Kulit Hitam di Toronto District School Board (TDSB) dan pelatihan anti rasisme wajib di semua tingkat dewan di Toronto.

2. Informal

Strategi informal yang digunakan oleh BLMGNF dimaksud oleh peneliti adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebijakan.

Information Politics Jaringan Advokasi BLM Cabang Australia dapat dilihat dengan peran media nasional yaitu Australian Broadcasting Corporation (salah satu media siaran nasional di Australia) yang menyiarkan rapat Umum BLM yang di hadiri 3.500 orang di Melbourne pada Juli 2016. Aktivis BLM di Australia secara aktif mengangkat kasus-kasus rasisme terdahulu yang dikaitkan dengan isu BLM di Amerika kemudian di sebarakan melalui media online seperti website BLM. Kasus-kasus seperti kematian David Dungay Junior pada tahun 2015 di penjara New South Wales.

Pada *Information Politics* Jaringan Advokasi BLM Cabang Kanada dapat diidentifikasi dengan didirikannya BLM Cabang Kanada pertama kali oleh Janaya Khan (seorang aktivis sosial) dan Sandy Hudson di Toronto setelah insiden penembakan Jermaine Carby oleh Polisi Brampton pada tahun 2014, yang dipublikasikan oleh media surat kabar beropleh terbesar di Kanada yaitu Toronto Star.

Dari kasus rasisme dari tahun 2013 sampai 2020 terdapat beberapa *Symbolic Politics* yang dilakukan aktivis BLMGNF. Pada *Symbolic Politics* jaringan Advokasi BLM Cabang Australia, dengan menggunakan tagar #blacklivesmatter di Australia sebagai klaim atas isu

yang sama antara Amerika dan Australia atau disebut Aborigin Lives Matter, aksi demonstrasi di beberapa kota di Australia sebagai bentuk protes terhadap kasus diskriminasi suku Aborigin di Australia, dan gerakan BLM mendapatkan hadiah Sydney Piece Prize pada tahun 2017.

Selanjutnya, pada *Symbolic Politics* jaringan Advokasi BLM Cabang Kanada, juga dengan menggunakan tagar yang sama yaitu #blacklivesmatter, melakukan beberapa aksi seperti aksi menutup jalan Allen Road di Toronto, aksi duduk pada saat parade Pride pada tahun 2016, dan aksi protes penghentian layanan polisi di tahun 2020.

Kemudian *Symbolic Politics* BLMGNF juga bisa dilihat dengan diadakannya pameran seni “Black Lives Matter” di First Unitarian Universalist Church of Richmond selama 30 hari yang menampilkan lebih dari 30 seniman.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun dari rumusan masalah yang diajukan peneliti, yaitu “bagaimana strategi yang digunakan oleh BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan Black Lives Matter?”

Peneliti menemukan strategi yang digunakan oleh BLMGNF dalam proses transnasionalisasi gerakan Black Lives Matter: (1) Formal. Formal yang dimaksud peneliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Meliputi *Leverage Politics* dan *Accountability Politics*. (2) Informal yang dimaksud peneliti adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebijakan. Meliputi *Information Politics* dan *Symbolic Politics*.

B. SARAN

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang terkait dengan isu rasisme khususnya isu Black Lives Matter. Diharapkan juga penelitian ini diteliti secara mendalam dengan variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra. F & Daniah. R. 2020. *Resonansi Black Lives Matter di Autralia*. Samarinda: Universitas Mulawarman. Jurnal Online diakses pada tanggal 23 Maret 2021.
- Andrew, Costly w. 2019. "A Brief History of Jim Crow." Constitutional Rights Foundation, Constitutional Rights Foundation.
- Henry, P. J., David O. Sears. 2003. *Race and Politics: The Theory of Symbolic Racism*. Los Angeles: University of California.
- Ludong, Michel Juanda, dkk, 2016. "Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap Penegakan HAM di Argentina", Jurnal Wanua, Universitas Hassanudin, 1(3): 21-39.
- Maghfirah Sitti R. M. 2020. *Peran Musisi Hip Hop Dalam Gerakan Sosial Transnasional Anti Rasisme Di Amerika Serikat (Studi Kasus Black Lives Matter)*. Makassar: Universitas Hasanuddin. Jurnal Online diakses pada tanggal 21 Maret 2021.
- Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. 1999. *Transnasional Advocacy Network in International And Regional Politics**. Published by Blackwell Publisher.
- Middleton Stephen. 2020. *Repressive Legislation: Slave Codes, Northern Black Laws, and Southern Black Codes*.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199329175.013.634> diunduh pada tanggal 17 Februari 2022.

Milzam Julian E. 2020. *Gerakan Perlawanan Terhadap Rasisme Bentuk Baru "Black Lives Matter" Di Amerika Serikat*. Malang: Universitas Muhammadiyah. Jurnal Online diakses pada tanggal 21 Maret 2021.

Nye, Joseph S., and Robert O. Keohane. 1971. "*Transnational Relations And World Politics: An Introduction; International Organization*". Oxford University, 2014, Insight Intermediate Student's Book Unit 8, Oxford University Press, hal 3.

Rino Sonya Y. 2021. *Peran Cyberactivism Oleh Anonymous Group Dalam Black Lives Matter Movement Di Amerika Serikat (2014-2020)*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal Online diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

Rusmanto Joni. 2013. *GERAKAN SOSIAL, Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahan*. Sidoarjo: Zifatama.

Soetjipto Ani. 2018. *TRANSNASIONALISME, Peran Aktor Non Negara Dalam Hubungan Internasional*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Widyani, A. S. & Tri Arivia D. Y. 2020. Transnational Relations And Activism In International Relations: Debates And Consensus In Literature. Jurnal Politik Internasional Vol. 22 No. 1. Jurnal Online diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

<https://blacklivesmatter.com/> diakses pada tanggal 19 April 2021.

<https://www.dw.com/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

<https://www.bbc.com/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

<https://www.nytimes.com/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

<https://www.liputan6.com/> diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

<https://www.britannica.com/> diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

<https://www.theguardian.com/> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

<https://www.barrons.com/> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

<https://www.cbc.ca/> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

<https://www.dr.dk/> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

<https://www.dw.com/> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

<https://www.japantimes.co.jp/> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

<https://www.nzherald.co.nz/> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

www.kompas.com/ diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

www.history.com/ diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

www.france24.com/ 2020 diakses pada tanggal 9 Februari 2022.